BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidup. Sesuai dengan tujuan negara yang selama ini dicita-citakan oleh masyarakat ialah dapat terciptanya suatu kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan dalam suatu bangsa Indonesia. Tujuan negara tersebut terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 (ke empat) yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kebutuhan manusia merupakan sesuatu yang harus dipenuhi karena dengan terpenuhinya kebutuhan maka dapat membuat seseorang bertahan untuk hidup. Menurut tingkatannya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat penting untuk dipenuhi,

seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti *handphone*, televisi, dan sebagainya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang paling akhir yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan tersier terpenuhi, seperti mobil, motor, perhiasan, dan sebagainya.

Namun pada kenyataannya, dalam proses untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia selalu mendapatkan hambatan sehingga pada akhirnya manusia selalu membutuhkan bantuan dari manusia yang lain. Manusia dapat terklasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, hingga jumlah harta kekayaan yang menjadikan adanya jarak antara golongan yang berkecukupan dengan golongan yang tidak berkecukupan. Akan tetapi adanya hati nurani dari setiap manusia untuk saling membantu sesama dan saling tolong menolong membuat golongan yang berkecukupan bersedia untuk membantu sesamanya tanpa memandang suku, ras, agama dan sebagainya, yaitu salah satunya dengan cara memberikan sumbangan atau sering juga disebut sebagai donasi.

Donasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan atau dapat juga diartikan sebagai pemberian atau hadiah.¹ Sedangkan sumbangan adalah suatu pemberian yang bersifat santunan dan bertujuan untuk

¹ <http://kbbi.web.id/donasi/>. Diakses pada tanggal 30 April 2019 pukul 13:25.

memberikan bantuan serta sokongan. Atau dengan kata lain, donasi adalah tindakan dimana seseorang yang memiliki suatu hal secara sukarela untuk memindah-tangankan kepemilikan dari dirinya kepada oranglain.² Adapun seseorang yang memberikan donasi tersebut disebut dengan donatur.

Seiring dengan perkembangan waktu dan masyarakat, maka teknologi pun berkembang dengan pesat. Semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk untuk berinteraksi antar sesamanya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia dan segala kegiatannya tidak dapat terlepas dari teknologi. Adanya perkembangan teknologi tersebut sangat membantu manusia, salah satunya untuk memenuhi hakikat manusia yang pada dasarnya ialah makhluk sosial. Perkembangan teknologi tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang terdekat saja, namun meluas hingga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Adanya proses untuk menyamakan kehendak dan tujuan dapat dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan suatu sarana perantara. Dalam perkembangan teknologi saat ini, internet dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk berkomunikasi. Jaringan internet menjadi semacam jembatan penghubung telepatis dari manusia ke manusia lainnya dengan kecepatan cahaya menembus batas waktu.³ Perkembangan internet telah membawa pengaruh yang besar dalam segala aspek kehidupan manusia, dan dipakai

² Poerwardaminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1983, hlm 5.

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 48.

hampir pada semua kegiatan. Perkembangan ini membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum.⁴

Adanya perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat memang banyak membawa keuntungan bagi masyarakat, namun di samping keuntungan tersebut terdapat adanya suatu kerugian atau risiko yang dapat ditimbulkan dari perkembangan teknologi. Seperti yang sudah diketahui, bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan munculnya internet maka dapat menjadi sarana untuk orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan adanya perkembangan teknologi tersebut.

Salah satu wadah untuk menyampaikan informasi ialah dapat melalui *Website*. *Website* adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video maupun gabungan dari semuanya yang biasanya dibuat untuk personal, organisasi dan perusahaan.⁵ Contoh yang dapat menjadi wadah dalam kegiatan pengumpulan donasi secara *online* dapat dilihat seperti Kitabisa.com , Rumah Zakat, Indorelawan, WeCare.id dan sebagainya. Adanya suatu wadah yang memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial yang pada dasarnya memang dimiliki oleh setiap manusia memang suatu hal yang baik jika dilakukan dengan niat yang baik, namun

⁴ L.G Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas Edisi Revisi*, Jakarta, Mega point Kesant Blanc, 2002, hlm.82.

⁵ <https://www.indoweb.site/>. Diakses pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 21:22.

tidak menutup kemungkinan adanya seseorang yang ingin memanfaatkan keadaan hanya untuk kepentingan pribadinya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Kegiatan transaksi pun kini dapat dilakukan secara elektronik melalui telepon genggam, tablet, atau perangkat genggam lainnya.⁶

Adapun mekanisme penyaluran donasi secara singkat oleh Kitabisa.com ialah pertama-tama *Platform* menyediakan fasilitas untuk menggalang dana yang dibuat secara *online*, kemudian *Platform* tersebut membebaskan seseorang untuk membuat *campaign* secara gratis dan untuk setiap donasi yang terkumpul maka *Platform* mengenakan biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) kecuali untuk kategori bencana alam dan zakat yang diinisiasi oleh lembaga resmi atau NGO maka tidak dikenakan biaya administrasi. Setelah membuat *campaign*, *campaigner* harus memberikan informasi secara lengkap, jelas, dan transparan. Selain itu *campaigner* juga harus melakukan verifikasi dengan mengupload foto kartu tanda penduduk (KTP) dan foto diri untuk menyesuaikan. Setelah itu *campaigner* dapat mempromosikan *campaign* yang dibuatnya dan mengajak oranglain untuk menyumbangkan donasi dengan cara menyebarkan link *campaign* pada *social*

⁶ Veithzal Rivai, *Financial Institute Management*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.47.

media yang ia miliki. Apabila telah ada donatur yang menyumbangkan dana pada *campaign* tersebut, maka dana yang diberikan oleh donatur akan masuk ke dalam rekening bersama suatu *Platform*. Jika dana sudah terkumpul, maka *campaigner* dapat kapan saja untuk mencairkan dana hasil dari para donatur. Pada tahap terakhir ini lah permasalahan tersebut timbul, dimana *campaigner* bisa saja menyalahgunakan uang yang diberikan oleh para donatur hanya untuk kepentingan pribadinya.

Seperti halnya contoh kasus yang menyalahgunakan kegiatan pengumpulan donasi secara *online* ialah kasus Cak Budi. Pada kasus ini Cak Budi diketahui membeli iPhone dan mobil Fortuner dengan menggunakan uang donasi yang diberikan para donatur untuk membantu orang-orang yang kurang mampu.⁷ Hal ini tentu saja telah menyalahgunakan donasi yang ia peroleh secara *online* dengan tidak mempergunakan hasil pengumpulan donasi dengan semestinya. Dengan adanya kasus Cak Budi maka timbul lah permasalahan hukum terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pihak *Platform* dan *Campaigner* dalam kasus penyalahgunaan donasi dan bagaimana pemerintah harus mengawasi kegiatan pengumpulan donasi tersebut. Dalam kasus ini memang ada keterkaitan dengan aspek hukum pidana, namun skripsi ini akan secara khusus mengkaji tentang bagaimana

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi>. Diakses pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 21:41.

pertanggungjawaban pihak *Platform* dan *Campaigner* dalam kasus penyalahgunaan donasi ditinjau dari sudut hukum perdata.

Tulisan ini mempunyai kemiripan dengan yang dibuat oleh Thomy Budiman dari Universitas Kristen Maranatha dengan judul **TINJAUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN URUN DANA BERBASIS DONASI SECARA *ONLINE* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA URUN DANA BERBASIS DONASI SEHUBUNGAN DENGAN AKTIVASI *PLATFORM* TIDAK BERIZIN DAN PENYALAHGUNAAN DANA DONASI**, yang membahas mengenai bagaimana peraturan perUndang-Undangan di Indonesia mengatur kegiatan urun dana berbasis donasi secara *online* dan bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara urun dana berbasis donasi secara *online* yang melakukan penyalahgunaan dana. Dalam penulisan ini yang menjadi pembeda adalah penulis membahas tentang bagaimana tanggungjawab hukum pihak *platform* dan *campaigner* apabila terdapat adanya suatu kasus penyalahgunaan dana pada kegiatan donasi secara *online* dilihat dari perspektif hukum perdata dan bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk mengawasi kegiatan donasi *online* tersebut, seperti yang kita ketahui dalam hal ini bukan hanya *campaigner* yang dapat bertanggungjawab apabila terdapat adanya suatu tindakan penyalahgunaan dana, namun tindakan tersebut bisa saja dilakukan oleh *platform* yang

tentunya apabila terbukti dilakukan oleh *platform* maka harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mengambil judul penulisan skripsi **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK PLATFORM DAN CAMPAIGNER DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA PADA KEGIATAN DONASI SECARA ONLINE DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN PENGUMPULAN DONASI ONLINE.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban *Platform* dan *Campaigner* dalam terjadinya kasus penyalahgunaan dana pada kegiatan donasi *online* dilihat dari perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pengumpulan donasi *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal yang menjadi dasar dan tujuan dituliskannya skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban *Platform* dan *Campaigner* dalam terjadinya kasus penyalahgunaan dana pada kegiatan donasi *online*.
2. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pengumpulan donasi *online*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat teoritis, yakni dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengetahuan bidang hukum perdata mengenai pertanggungjawaban hukum pihak *platform* dan *campaigner* dalam kasus penyalahgunaan dana pada kegiatan donasi secara *online* dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pengumpulan donasi *online*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, penegak hukum dan masyarakat luas baik yang bersentuhan langsung dengan perkara donasi *online*,

maupun sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai pertanggungjawaban *platform* dan *campaigner* dalam terjadinya kasus penyalahgunaan dana pada kegiatan donasi *online*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.⁸ Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁹ Seperti yang sudah kita ketahui, perkembangan waktu memunculkan sesuatu yang disebut dengan internet. Adanya internet tidak hanya membantu manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya, namun juga membantu manusia untuk melakukan transaksi secara online atau tidak bertatap muka, termasuk

⁸ Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2002, hlm. V.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Penerbit Binacipta, 1986, hlm. 11.

dalam transaksi penyaluran donasi berbasis *platform*. Walaupun penyelenggaraan pengumpulan donasi tersebut telah diatur oleh peraturan perUndang-Undangan namun tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan yang dilakukan dengan mengatasnamakan pengumpulan donasi yang akhirnya hasil dari donasi tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi.

Dengan adanya perkembangan teknologi, maka perkembangan kebutuhan manusia semakin meningkat. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, dan selalu meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Oleh karena itu untuk mengikuti perkembangan masyarakat, maka dibutuhkan adanya hukum untuk mengatur masyarakat. Pada hakikatnya hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum selalu memiliki tujuan untuk menertibkan masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini yang dipermasalahkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*). Hukum itu ada untuk manusia, artinya hukum tersebut harus memberikan manfaat bagi manusia. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya, yang ada di masyarakat.¹⁰

¹⁰ Rommy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 13-14.

Hukum selalu berubah dan berkembang mengikuti masyarakat, hal ini perlu dilakukan agar ada yang mengatur perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Apabila hukum tidak berubah dan tidak berkembang mengikuti masyarakat, maka pada akhirnya tidak ada yang mengatur perbuatan masyarakat. Di Negara Indonesia, hukum itu mengatur seluruh tingkah laku, perbuatan dan tindakan manusia dalam sebuah kelompok masyarakat, yang dalam pendefinisannya sendiri hukum itu menurut *Hans Kelsen* adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia.¹¹ Hal ini lah yang menjadi celah untuk masyarakat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, itulah mengapa hukum harus berubah dan berkembang agar tidak adanya kekosongan hukum.

Kekosongan hukum adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tata tertib tertentu di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, kekosongan hukum adalah kekosongan Undang-Undang atau kekosongan peraturan perUndang-Undangan. Hal ini dapat terjadi karena dalam penyusunan peraturan perUndang-Undangan pada kenyataannya memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga pada saat peraturan

¹¹ Marjan Miharja, Cetakan Pertama, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2019, hlm 15.

perUndang-Undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah.¹²

Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perUndang-Undangan, atau walaupun sudah diatur dalam suatu peraturan perUndang-Undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.¹³ Hukum positif yang berlaku pada suatu negara merupakan suatu sistem yang formal, dan agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Itulah alasan mengapa hukum itu harus selalu mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, karena jika tidak dilakukan maka akan terjadi kekosongan hukum yang berdampak tidak adanya kepastian hukum.

Salah satu tujuan hukum adalah adanya kepastian hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Yang dalam hal ini artinya Hukum ditempatkan sebagai pondasi untuk mengatur masyarakat. Dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat harus dan

¹² Hario Mahar Mitendra, *Fenomena Dalam Kekosongan Hukum*, Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.8 Nomor 2 2018, hlm 1.

¹³ *Ibid*, hlm 2.

tidak dapat terlepas dari adanya hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁴

Dengan adanya hukum yang mengatur masyarakat, maka akan menimbulkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum inilah yang akan menjadikan masyarakat merasakan adanya suatu keadilan. Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat.¹⁵ Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.¹⁶ Jadi dengan adanya kepastian hukum, diharapkan suatu negara dapat mengupayakan penegakan hukum dengan baik untuk masyarakat.

Hukum dibagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang publik dan privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum publik meliputi hukum

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1991, hlm 39.

¹⁵ *Loc.Cit*, hlm 27.

¹⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kepastianhukum/>. Diakses pada tanggal 06 Mei pukul 20:23.

pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara.¹⁷ Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang.¹⁸

Menurut hukum perdata setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggung jawabkan atas sejumlah kerugian yang di derita pihak lain.¹⁹ Suatu perbuatan, menurut perkembangan pemikiran ilmu hukum, terutama melalui yurisprudensi, tidak saja mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pihak lain, tetapi juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, baik dalam hubungannya dengan pribadi maupun dengan harta benda orang lain.²⁰ Suatu proses tanggung jawab membayar ganti rugi, lazimnya dikaitkan dengan hal tertentu yang menjadi penyebab timbulnya kerugian, yaitu terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan.²¹

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Pendapat secara umum mengatakan bahwa hak

¹⁷ Wibowo T. Tunardy, *Perbedaan Hukum Privat dan Hukum Publik*, Jurnal Hukum, 2012, hlm 1.

¹⁸ <https://jurnalhukumindonesia.com/2018/01/15/sistem-hukum-perdata-indonesia/> . Diakses pada tanggal 02 Agustus 2019 pukul 11:57.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata 1975 dalam N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm.306.

²⁰ *Ibid*, hlm 307.

²¹ Komar Kantaatmadja, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut, Alumni 1981 dalam N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm.306.

pada seseorang selalu berhubungan dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²² Atau dengan kata lain tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²³ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.²⁴

Dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).²⁵

²² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm 22.

²³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 45.

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hlm 48.

²⁵ *Ibid*, hlm 49.

Selain itu, harus terdapat adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.²⁶ Sedangkan pengawasan menurut Sarwoto adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.²⁷

Robert J.M Ockler mengemukakan bahwa unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸

²⁶ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2011, hlm 176.

²⁷ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977, hlm 93.

²⁸ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Rafika Aditam, 1999, hlm 360.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional. Adapun penulis akan menguraikan beberapa definisi sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban Hukum : adalah pertanggungjawaban setiap orang yang melakukan hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁹

b. *Platform* : adalah rencana kerja atau program.³⁰

Atau dengan kata lain *Platform* adalah wadah berupa aplikasi, situs internet dan/atau layanan lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi Penggalangan Dana melalui sistem elektronik.

c. *Campaigner* : adalah individu, kelompok, badan usaha atau badan hukum yang menggunakan fasilitas Penggalangan Dana pada *Platform* untuk sebuah *Campaign* tertentu dan bertanggung jawab atas Pelaksanaan *Campaign* yang bersangkutan.

²⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Op.Cit*, hlm 48.

³⁰ <https://kbbi.web.id/platform>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2019 pukul 13:39.

- d. *Campaign* : adalah suatu usaha Penggalangan Dana untuk maksud dan tujuan tertentu, termasuk pada kategori bantuan medis, atlet dan fasilitas olahraga, infrastruktur, pendidikan dan beasiswa, difabel, umrah dan haji, panti asuhan dan rumah ibadah, baik dengan ataupun tanpa janji imbalan.
- e. Dana : adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan/ biaya/ kesejahteraan atau bisa juga sebagai pemberian/ hadiah/ derma.³¹
- f. Donasi : adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan atau dapat juga dikatakan sebagai pemberian atau hadiah.³²
- g. Donatur : adalah orang yang menyumbangkan uang secara sukarela kepada *Platform*.
- h. Penyalahgunaan Dana : ialah menurut Pasal 372 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.
- i. Donasi *Online*: adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan atau dapat juga dikatakan

³¹ <https://kbbi.web.id/dana>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2019 pukul 13:56.

³² <https://kbbi.web.id/donasi>. Diakses pada tanggal 08 Mei pukul 14:05.

sebagai pemberian atau hadiah yang diberikan melalui suatu jaringan internet atau tidak bertatap muka secara langsung.

- j. Pengawasan Pemerintah : adalah pengawasan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 35.

diteliti.³⁴ Berkaitan dengan metode penelitian tersebut penulis akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban hukum pihak *platform* dan *campaigner* dalam kasus penyalahgunaan dana pada kegiatan donasi secara *online* dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pengumpulan donasi *online*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia.³⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perUndang-Undangan yaitu pendekatan dengan ketentuan Undang-Undang yang dijadikan dengan referensi dalam memecahkan isu hukum.³⁶ Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

³⁵ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Rosdakarya, 2006, hlm. 72.

³⁶ Peter Mahmud, *Op.Cit*, hlm.96.

berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena dapat menjadi pondasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁷

Penulis akan mengkaji isu hukum mengenai pertanggungjawaban hukum pihak *platform* dan *campaigner* dalam kasus penyalahgunaan dana pada kegiatan donasi secara *online* dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pengumpulan donasi *online* berdasarkan hukum yang berlaku, kasus yang bersangkutan dan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini di dukung oleh data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta data primer sebagai pelengkap yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder terdiri atas :

³⁷ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.45.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri atas UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait, catatan resmi dalam pembuatan undang-undang peraturan lain diluar undang-undang.³⁸ Di bawah ini adalah bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis

³⁸ Rommy Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 53.

Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online*;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis memahami bahan hukum primer, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, buku, kamus hukum, literatur, artikel dalam internet, makalah, serta jurnal dan publikasi hukum.³⁹

Bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai pendukung dari data yang digunakan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

³⁹ *Loc.Cit*, hlm. 18.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, kamus, laporan penelitian, ensiklopedi hukum, maupun indeks kumulatif dan lain sebagainya.⁴⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview”.⁴¹ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Literatur dan Perundang-Undangan

Studi literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur berisi tentang pertanggungjawaban perdata *platform*

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm. 15.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 20.

dan *campaigner* dalam kasus penyalahgunaan dana pada kegiatan donasi secara *online*.

b. Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan pertanyaan itu.”⁴² Penulis akan melakukan wawancara dengan *platform* kitabisa.com, ACT.ID (AksiCepatTanggap), dan *platform-platform* donasi lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.⁴³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan -

⁴² Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, hlm.186.

⁴³ *Op.Cit*, hlm. 103.

pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.⁴⁴

Dalam hal ini penulis akan menggunakan pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengkaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN UMUM PENGATURAN HUKUM PERDATA DALAM KEGIATAN DONASI SECARA *ONLINE*

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai aspek pertanggungjawaban hukum perdata pelaku penyalahgunaan dana donasi.

⁴⁴ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.7

BAB III :PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN PUNGUMPULAN DONASI *ONLINE*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pengumpulan donasi secara *online* berdasarkan hukum di Indonesia.

BAB IV :PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK *PLATFORM* DAN *CAMPAIGNER* DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA PADA KEGIATAN DONASI *ONLINE*

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB 1 berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V :PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas serta akan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.